

KEMANDIRIAN
EKONOMI
GERBANG KESEJAHTERAAN

PEMIKIRAN



EKONOMI
INDONESIA

INDEF

Di tengah kondisi global yang tidak pasti, ekonomi domestik menjadi tumpuan. Namun, bukanlah hal mudah kemandirian untuk kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan. Pemikiran 100 ekonom ini mencari celah agar bangsa ini tetap bertahan dan berkembang lebih baik

KEMANDIRIAN
EKONOMI
GERBANG KESEJAHTERAAN

PEMIKIRAN
100
EKONOM
INDONESIA

INDEF

**KEMANDIRIAN EKONOMI
GERBANG KESEJAHTERAAN:
PEMIKIRAN 100 EKONOM INDONESIA**

Copyright©2019, INDEF

Diterbitkan oleh INDEF, 2019
INDEF
Jl. Batu Merah No.45, Pejaten Timur
Jakarta, 12510
e-mail: indef@indef.or.id

Editor: Tim INDEF
Perancang Sampul: Sarwo Edhie

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
Atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit

xiv+532 hlm; 15 cm x 23 cm
ISBN: 978-602-50636-6-4

Perpustakaan Nasional RI. Data Katalog dalam Terbitan (KDT)
Kemandirian Ekonomi Gerbang Kesejahteraan:
Pemikiran 100 Ekonom Indonesia/ editor: Indef- Jakarta: INDEF, 2019
532 hlm; 23 cm

Daftar Isi

Daftar Isi	i
Kata Pengantar	ix
Pendahuluan	1
BAGIAN I	
SINERGITAS STIMULUS FISKAL DAN PERCEPATAN INFRASTRUKTUR	13
Membangun di Atas Ilusi Penerimaan Pajak?	14
<i>Akhmad Akbar Susanto</i>	
Babak Baru Kebijakan Fiskal Indonesia	18
<i>Anggito Abimanyu</i>	
Tantangan Pajak di Tahun Politik	21
<i>Agust Supriadi</i>	
Optimalisasi Desentralisasi Fiskal untuk Kemakmuran Rakyat	27
<i>Arif Budimonta</i>	
Rasio Pajak 16%, Mungkinkah?	31
<i>Dradjad H. Wibowo</i>	
Pajak, Ekonomi, dan Tahun Politik	36
<i>Darussalam</i>	
Membangun di Atas Ilusi Penerimaan Pajak?	40
<i>Dzulfian Syafrian</i>	
Menguji Efektifitas Stimulus Fiskal	44
<i>Enny Sri Hartati</i>	
Utang, Pajak, dan Ketahanan Fiskal	50
<i>Hidayat Amir</i>	

Koordinasi Fiskal dan Moneter untuk Ketahanan Fiskal dan Stabilitas Ekonomi <i>I Kadek Dian Sutrisna Artha</i>	54	<i>Quo Vadis</i> Konsolidasi Perbankan Indonesia? <i>Budi Santosa</i>	125
Tarif Cukai Rokok Optimal Bagi Indonesia <i>Muliadi Widjaja</i>	58	Industri Jasa Keuangan (IJK) dan Pembangunan Nasional Berkeadilan <i>Firmanzah</i>	128
Beban Berat Utang BUMN dan Nasib Rakyat <i>Salamudin Daeng</i>	62	IZN dan Penguatan Kebijakan Perzakatan Nasional <i>Irfan Syauqi Beik</i>	132
Menjaga Momentum dan Menyusun Prioritas <i>Yustinus Prastowo</i>	68	Penguatan Peran Keuangan Memacu Pertumbuhan Berkesinambungan <i>Joshua Pardede</i>	136
Pembiayaan Inovatif untuk Pembangunan Infrastruktur <i>Destry Damayanti</i>	72	Menyoal Kembali Kedalaman Sektor Keuangan <i>Lukman Hakim</i>	140
Kooptasi Modal Pada Infrastruktur <i>Ichsanuddin Noorsy</i>	77	Inklusi Perbankan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) <i>Marsuki</i>	144
Dampak Infrastruktur terhadap Perekonomian <i>M. Rizal Taufikurrahman</i>	83	<i>Crypto Currencies</i> : Peluang atau Ancaman Stabilitas Sistem Keuangan? <i>Mochanmad Doddy Ariefianto</i>	148
Potret Dinamika Pembangunan dan Racikan Fiskal Era Kabinet Kerja <i>Mohammad Reza Hafiz. A</i>	89	Antisipasi Dampak <i>Financial Technology</i> dan <i>Financial Innovation</i> terhadap Stabilitas Sistem Keuangan <i>Telisa Aulia Falianty</i>	152
BAGIAN II		Kebijakan Moneter, Perbankan dan Ekonomi Lima Persenan <i>Umar Juoro</i>	158
INKLUSI KEUANGAN	99	Uang Beredar: Cermin Benggala Sinkronisasi Kebijakan Mikro-Makro <i>Yanuar Rizky</i>	162
Tantangan Mencapai <i>Single Digit Interest Rate</i> <i>Abdul Manap Pulungan</i>	100	BAGIAN III	
Mendorong Inklusi Keuangan yang Berkualitas dan Berkeadilan <i>Agus Herta Sumarto</i>	104	UMKM, INDUSTRI DAN PERSAINGAN USAHA	167
Tantangan Perbankan Indonesia di Masa Depan <i>Andry Asmoro</i>	107	Ekonomi Politik "Kredit Usaha Rakyat" untuk Mendorong Ekonomi yang Berkeadilan <i>Akhmad Syakir Kurnia</i>	168
FinTech, Inklusi Keuangan dan Stabilitas Perekonomian <i>A. Prasetyantoko</i>	111	UMKM Tidak Sekadar Pengaman Ekonomi <i>Awalil Rizky</i>	175
Pendalaman Sektor Keuangan di Indonesia <i>Aviliani</i>	117		
Finansialisasi dan Ketimpangan Ekonomi Indonesia <i>Media Wahyudi Askar</i>	121		

Potensi dan Optimalisasi UMKM dalam Era Disrupsi <i>Ina Primiana</i>	180	Beberapa Tantangan Ketenagakerjaan di Indonesia <i>Devanto Shasta Pratomo</i>	248
Potensi dan Optimalisasi UMKM <i>Sugiyono Madelan</i>	185	Efisiensi Ekonomi Digital yang Melenakan Pasar Tenaga Kerja <i>Eka Puspitawati</i>	252
UMKM, Kemandirian dan Daya Saing Ekonomi Nasional <i>Miyasto</i>	189	Bonus Demografi, Tabungan Nasional dan Perbaikan Neraca Transaksi Berjalan <i>Fakhrul Fulvian</i>	256
Upaya Akselerasi Industri Manufaktur <i>Andry Satrio Nugroho</i>	192	Nawacita 100 <i>Science & Techno Parks</i> dan Arah Kebijakan Inovasi <i>Hanif Muhammad</i>	259
Sekali lagi, Mendorong Sektor Industri Indonesia <i>Dendi Ramdani</i>	196	Negara dan Kuasa Pasar Perusahaan Teknologi <i>Harryadin Mahardika</i>	264
Mendorong Peran Sektor Industri Berorientasi Ekspor <i>Eisha Maghfiruha Rachhini</i>	200	ZIKR dan Kinerja Bisnis <i>M. Luthfi Hamidi</i>	270
Memperkuat Investasi Modal Sosial Menghadapi Revolusi Industri Generasi Keempat <i>Evi Noor Afifah</i>	203	Ketimpangan Ketenagakerjaan dan Produktivitas Perekonomian <i>Ninasapti Triaswati</i>	280
Deindustrialisasi Prematur dan Jebakan Kelas Menengah <i>Mohammad Faisal</i>	207	Membangun Ekonomi Kreatif Yang Berkelanjutan <i>Rachmat Adhani</i>	284
<i>Global Value Chain</i> dan Strategi Industrialisasi Kayu <i>Tauhid Ahmad</i>	213	Ekonomi Inovatif dan Kebutuhan SDM Pendidikan Tinggi <i>Rina Indistuti</i>	289
Paradigma " <i>Flying Geese</i> " dan Pemetaan Keunggulan Komparatif <i>Tri Widodo</i>	219	Revitalisasi Pendidikan Vokasi untuk Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja <i>Sonny Harry B Harmadi</i>	294
Ekonometrika Persaingan Usaha <i>Eugenia Mardanugraha</i>	226	Bonus Demografi, Kualitas SDM, Kemiskinan, dan Ketimpangan <i>Suharyadi</i>	299
Meningkatkan Efisiensi Sektor Industri Melalui Persaingan Usaha Sehat <i>Maman Setiawan</i>	231	<i>Moving To Higher Gear: Prioritas SDM dan Inovasi Teknologi</i> <i>Muhammad Syarkawi Rauf</i>	305
BAGIAN IV		Liberalisasi di Tengah Deindustrialisasi Dini <i>Ahmad Heri Firdaus</i>	310
SDM, DAYA SAING DAN KEMANDIRIAN EKONOMI	237	Kinerja Perdagangan Internasional Indonesia: <i>Quo Vadiz?</i> <i>Kodrat Wibowo</i>	314
Menunggu (Lulusan) Vokasi Bekerja <i>Berly Martawardaya</i>	238	Perdagangan Bebas dan Industrialisasi <i>Piter A. Redjalam</i>	318
Mendorong Penguatan Peran Pendidikan Vokasi <i>Deniey A. Purwanto</i>	242		

Memperluas Perdagangan Bebas, Dapatkah Memperbaiki Neraca Perdagangan? <i>Tony Irawan</i>	322
Tantangan Memperbaiki Defisit Neraca Jasa <i>Widyastutik</i>	327
Menuju <i>Current Account</i> Surplus <i>Wijayanto Samirin</i>	332
Mitigasi Meningkatnya Harga Minyak Dunia <i>Eko Listiyanto</i>	338
Politik Energi & BBM <i>Marwan Batubara</i>	343
Ongkos Ekonomi dan Psikologis Harga BBM di Indonesia <i>Sahara</i>	350
Meratakan Jalan Menata Ekonomi Nasional <i>Andrinof A Chaniago</i>	355
Tantangan Populisme Ekonomi Presiden Jokowi <i>Arianto A. Patunru</i>	360
Indonesia Peringkat Empat Dunia Pada 2045 <i>Christianto Wibisono</i>	366
<i>Quo Vadis</i> Kedaulatan Pangan dan Energi <i>Dina Nurul Fitria</i>	371
Bencana Dalam Perspektif Ekonomi <i>Fajri Muharja</i>	374
Membaca Arah Ekonomi Mendatang <i>Fithra Faisal Hastiadi</i>	379
Lompat Katak Pertumbuhan di Tengah Ketatnya Likuiditas Global <i>Masyita Crystallin</i>	384
Belajar dari Rupiah <i>Unggul Heriqbaldi</i>	388
<i>Underground Economy</i> di Era Digital <i>Bhima Yudhistira Adhinegara</i>	393

BAGIAN V PEMBANGUNAN PERTANIAN, PERDESAAN DAN DAERAH TERTINGGAL	397
Penggerak Ekonomi Agribisnis Indonesia <i>Bayu Krisnamurthi</i>	398
Kunci Keberhasilan Kemitraan Pertanian <i>M. Fadhil Hasan</i>	404
Pengembangan Hortikultura untuk Pembangunan Pangan <i>Muhammad Firdaus</i>	408
<i>Sertifikasi Kopi, Mensejahterakan Siapa?</i> <i>Esther Sri Astuti S.A.</i>	417
Perhutanan Sosial: Hambatan dan Risiko <i>Ari Rakatama</i>	421
Sudah Tepatkah Pemanfaatan Dana Desa Saat Ini? <i>Achmad Adhitya</i>	429
Beban Berat Dana Desa <i>Candra Fajri Ananda</i>	433
Keluar dari Perspektif Pembangunan Perdesaan yang <i>Growth Oriented</i> <i>Didin S Damanhuri</i>	438
Festival dan Pembangunan Ekonomi Lokal Inklusif-Kreatif <i>Dias Satria</i>	443
Dana Desa sebagai Stimulator Perekonomian Desa <i>Dita Nurul Aini</i>	449
Implementasi 4 Program Prioritas dalam Memajukan Desa <i>Eko Putro Sandjojo</i>	454
Enigma Ekonomi Lokal di Jalur Non-Tol Trans Jawa <i>Muhammad Zulfikar Rakhmat</i>	460
Permasalahan dan Alternatif Tata Kelola Kawasan Perbatasan Natuna <i>Tirta N. Mursitama</i>	464

BAGIAN VI	
TANTANGAN MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN	469
Agenda Pendalaman Ekonomi <i>Ahmad Erani Yustika</i>	470
Mencegah "Inequality for All" <i>Budi Hikmat</i>	475
Ketimpangan Ekonomi dan Kualitas Gizi Masyarakat <i>Bustanul Arifin</i>	481
Kesenjangan Ekonomi, Duri dalam Demokrasi <i>Didik J. Rachbini</i>	488
Solidaritas Szusclag <i>D. S. Priyarsono</i>	495
Mendorong Momentum Penurunan Angka Kemiskinan <i>Elan Satriawan</i>	499
Ketimpangan, Kemiskinan, dan Kesejahteraan: Sebuah Resume <i>Ginandjar Kartasasmita</i>	504
Meningkatkan Governansi untuk Pembangunan <i>Imaduddin Abdullah</i>	510
Pemerataan Ekonomi, dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia <i>Lucky Bayu Purnomo</i>	513
Desentralisasi Guna Mereduksi Ketimpangan Daerah <i>Riza Annisa Pujarama</i>	516
Keniscayaan Ketimpangan <i>Rusli Abdulah</i>	522
Rumah untuk Rakyat: Bagaimana Perkembangannya? <i>Winang Budoyo</i>	526

Pengantar

Indonesia sedang mengalami perlambatan ekonomi sebagai akibat perang dagang Amerika-China maupun memburuknya perekonomian dunia. Ekonomi domestik perlu dikuatkan, termasuk bagaimana menempatkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan sebagai tulang punggung memasuki situasi yang tidak diduga, termasuk resesi yang kini mulai menjalar ke berbagai negara. Kunci keluar dari situasi tersebut adalah kebijakan perlu fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, agar bonus demografi bisa membuahkan dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Sebagaimana disampaikan oleh Presiden dalam pidato kenegaraan pada pembacaan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2020 pada tanggal 16 Agustus 2019. Pesannya adalah APBN perlu digunakan untuk mengakselerasi daya saing Indonesia melalui inovasi dan penguatan kualitas sumber daya manusia.

Namun demikian, APBN saja bukanlah obat mujarab dan solusi final untuk mengatasi semua permasalahan ekonomi, mengingat dalam perekonomian ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan agar bisa lepas dari belenggu semua masalah tersebut. Penguatan sektor moneter, pendalaman sektor keuangan, hingga ekspansi pada sektor riil dan berbasis desa juga perlu didorong untuk membuka sekat-sekat kualitas pertumbuhan yang diinginkan. Buku ini merupakan salah satu kontribusi dari 100 Ekonom Indonesia sebagai upaya mengurai permasalahan ekonomi dari berbagai sektor guna mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Pemikiran 100 Ekonom dalam mengatasi berbagai tantangan yang terjadi dalam perekonomian Indonesia, khususnya kemandirian dan kesejahteraan, dituangkan ke dalam buku ini melalui 6 pokok bahasan yaitu: (1) sinergi stimulus fiskal dan percepatan

infrastruktur, (ii) inklusi keuangan, (iii) UMKM, industri dan persaingan usaha, (iv) sumber daya manusia, daya saing dan kemandirian ekonomi, (v) pembangunan pertanian perdesaan, dan daerah tertinggal dan (vi) tantangan mewujudkan kesejahteraan. Keenam topik tersebut diulas secara singkat, padat, namun juga perlu didiskusikan lebih lanjut dalam ruang yang lebih merasuk dalam pengambilan keputusan.

Saran yang diberikan 100 Ekonom untuk perbaikan perekonomian Indonesia merupakan hasil penelitian dan pemikiran yang dilandasi kaidah ilmiah dan mendalam. Oleh karenanya, buku ini tidak hanya berguna dan menjadi referensi utama bagi Pemerintah sebagai pengambil kebijakan tetapi juga dapat memperkaya khazanah literatur penting bagi para praktisi, akademisi, dan masyarakat agar dapat memahami fenomena perekonomian di Indonesia.

Jakarta, 3 Oktober 2019

Tim INDEF

PENDAHULUAN

Quo Vadis Kedaulatan Pangan dan Energi Indonesia (Dina Nurul Fitria, Ekonom, Universitas Pertamina)

Transformasi Struktural Ekonomi Indonesia

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dicanangkan oleh para founding fathers sejak kemerdekaan 73 Tahun lalu adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Pelaksanaan dari cita-cita NKRI tersebut tertuang dalam suatu dokumen haluan negara berbentuk ketetapan MPR dan berbentuk Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memuat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 serta visi misi Presiden pada periode tiap lima tahunan.

Sejak era *oil boom* awal tahun 90an, Indonesia telah memasuki Transformasi Struktural dari Negara Agraris Berpendapatan Menengah menuju Negara Industri dan Jasa Berpendapatan Tinggi. Masa transisi dari Negara Agraris menjadi Negara Industri ditandai oleh program Swasembada Pangan dan Kedaulatan Pangan yang bertumpu pada sektor industri dan jasa-jasa.

Menjadi Negara Industri dan Jasa yang mengolah hasil-hasil pembangunan sektor pertanian membutuhkan asupan energi yang berkelanjutan, baik energi yang bersumber dari sumber daya alam dan mineral, maupun energi *soft skill* berupa ide, kreatifitas, dan karakter baik sumber daya manusia Indonesia.

World Bank dalam beberapa publikasinya mencirikan negara maju sebagai negara yang memiliki pendapatan per kapita yang tinggi (minimal US\$ 12.476), terdapat sektor industri jasa (*tertiary sector of industry*) dan industri berbasis R&D mendominasi sektor ekonomi, dan peningkatan kualitas hidup penduduk berdasarkan parameter-parameter kualitatif antara lain *Human Development Index*, *life expectancy*, kemiskinan, pendidikan, kebahagiaan, dll. Atas dasar ciri tersebut, World Bank mengklasifikasikan Indonesia sebagai *Lower Middle Income Country*. Meski demikian, menurut publikasi UNIDO tahun 2017, sebagai negara berbasis industri manufaktur, Indonesia secara perlahan menaiki peringkat dari posisi 18 di tahun 1990 yakni periode saat terjadi penurunan harga minyak (1986 - 1996) menjadi di posisi 9 di dunia saat periode pemulihan krisis keuangan global.

Proses transformasi struktural perekonomian Indonesia dari basis pertanian menuju basis industri dan jasa maju, apakah bisa seiring dengan pencapaian kedaulatan energi dan pangan? Posisi strategis

energi dan pangan suatu negara dapat menjadi ukuran keberhasilan arah pembangunan nasional kedepan.

Rezim Harga Energi dan Pangan Murah

Statistik Indonesia mencatat, pada triwulan III-2018 struktur perekonomian Indonesia dari sisi pengeluaran didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dengan kontribusi sebesar 55,26 persen. Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto, dan Ekspor Barang dan Jasa memberikan kontribusi masing-masing sebesar 32,12 persen, dan 22,14 persen. Sedangkan Komponen Impor Barang dan Jasa memiliki kontribusi sebesar 22,81 persen.

Tingginya kontribusi Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga tersebut, mendorong konsumsi bahan bakar per hari dalam kisaran 84.000 liter. Pemerintah secara perlahan terus berupaya mengurangi porsi subsidi BBM, juga terus berupaya mengurangi porsi impor bahan bakar minyak. Jumlah konsumsi minyak bumi di Indonesia terus bertumbuh dengan laju 2.1% per tahun sedangkan produksi minyak bumi menurun - 0.21% per tahun. Pada akhir tahun 2017, jumlah cadangan minyak bumi di Indonesia diperkirakan di level 3,000 juta barrel (Sumber: paparan Kemenko Maritim 2018).

Sementara itu harga internasional minyak basis WTI menurun drastis pada 2 Oktober 2018 di posisi US\$76,41 per barel menjadi US\$52 per barel pada 6 Desember 2018, penurunan 32% ini diprediksi akan stabil turun karena aspek panas dingin hubungan dagang Amerika Serikat dan Cina dan keputusan pasokan minyak mentah dari OPEC+. *International Energy Agency* menyatakan perilaku kartel minyak mentah ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian pasokan global minyak mentah, risiko yang dihadapi para *trader* ditempuh dengan mengompensasikan harga yang rendah, ketimbang harga tinggi, dalam kisaran US\$8,5 per barel (Sumber: Bloomberg 2018).

Rezim penurunan harga minyak bumi, sejatinya dapat dimanfaatkan bagi sektor industri dan jasa untuk meningkatkan pemasukan negara dari industri berorientasi nilai tambah ekspor dan pendalaman struktur industri substitusi impor melalui pengembangan penguasaan teknologi. Nilai ekspor Indonesia Oktober 2018 mencapai US\$15,80 miliar, naik 3,59 persen (*year-on-year*). Porsi peningkatan nilai ekspor Oktober 2018 terbesar disumbang dari nonmigas mencapai US\$14,32 miliar atau naik 4,03 persen dibanding ekspor nonmigas Oktober 2017. Sementara itu ekspor migas pada Oktober 2018 turun 0,44 persen dibanding Oktober tahun sebelumnya.

Ditinjau menurut sektor, ekspor nonmigas hasil industri pengolahan Januari– Oktober 2018 naik sebesar 5,73 persen dibanding ekspor nonmigas hasil industri pengolahan periode yang sama tahun 2017 dan ekspor nonmigas hasil tambang dan lainnya naik 27,46 persen, sebaliknya ekspor nonmigas hasil pertanian turun 8,46 persen. Ekspor nonmigas

hasil pertanian yang turun tersebut antara lain ekspor komoditas minyak sawit pasca pemberlakuan larangan ekspor minyak sawit untuk bahan bakar nabati ke negara-negara Uni Eropa. Turunnya nilai ekspor nonmigas hasil pertanian juga karena adanya kebijakan hilirisasi industri pertanian dalam arti luas termasuk kelautan dan kehutanan di dalam negeri.

Sementara itu ekspor nonmigas hasil tambang dan lainnya naik antara lain dari komoditas batubara yang diolah menjadi *liquid carbon*, serta mineral lainnya (tembaga, timah, nikel dan bauksit yang harus diolah (hilirisasi industri pertambangan).

Nilai impor Indonesia Oktober 2018 sebesar US\$17,62 miliar, atau naik 20,60 persen dibanding impor September 2018, dan naik 23,66 persen jika dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya. Nilai impor nonmigas Oktober 2018 sebesar US\$14,71 miliar atau naik 19,42 persen dibanding September 2018. Sementara impor migas Oktober 2018 tercatat sebesar US\$2,91 miliar, naik 26,97 persen jika dibandingkan bulan sebelumnya.

Kenaikan nilai impor nonmigas terbesar Oktober 2018 adalah golongan mesin dan pesawat mekanik sebesar US\$363,2 juta, atau naik 16,65 persen dibanding September 2018 (US\$2.181,8 juta). Negara asal barang impor nonmigas terbesar Januari-Oktober 2018 ditempati oleh Tiongkok (US\$36,62 miliar) dengan pangsa 27,87 persen. Komposisi perdagangan impor nonmigas (khususnya hasil industri teknologi tinggi) dengan Tiongkok yang baru dimanfaatkan sekitar 27,87% berpotensi terjadi defisit perdagangan jangka panjang bagi Indonesia.

Impor nonmigas, khususnya pangan, menunjukkan porsi yang meningkat pada tahun 2017 di antara komoditas impor nonmigas lainnya. Dalam rezim harga energi rendah, sejatinya, impor pangan juga berkurang, apalagi worldbank mencatat consumer price index Indonesia pada tahun 2017 berada di angka 3,8 naik 0,3 dari tahun 2016 berada di angka 3.5.

Maknanya, impor pangan yang meningkat di tengah-tengah harga energi rendah dan kemampuan konsumsi rendah dapat dimanfaatkan untuk memacu sektor ekonomi produktif yang berbasis olahan sumber daya alam dan sumber daya manusia domestik. Sekaligus, dapat memanfaatkan peluang dari diversifikasi sumber energi dan pangan untuk meningkatkan pertumbuhan industri dan jasa dalam rangka menyambut Revolusi Industri 4.0.

Paradigma Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Teknologi Maju

Dalam rangka memastikan manfaat globalisasi di era Revolusi Industri 4.0 dapat dipetik berkesinambungan, maka harus segera diperbarui paradigma sumber-sumber pertumbuhan ekonomi berteknologi tinggi yang

memanfaatkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia domestik, kedalam suatu dokumen haluan negara.

Dengan demikian, *quo vadis* kedaulatan energi dan pangan Indonesia dalam konteks perubahan perekonomian global yang ditandai dengan industri dan jasa maju berteknologi tinggi dan berbiaya produksi rendah akibat energi murah, harus diupayakan sungguh-sungguh untuk memetik neraca perdagangan positif terhadap negara-negara mitra dagang, melalui industri berorientasi ekspor bernilai tambah sektor pertanian (termasuk kelautan dan kehutanan) dan barang tambang serta mineral yang mengandalkan kemampuan ide, kreatifitas dan inovasi segenap penduduk Indonesia yang terdidik, terampil dan beretika moral baik.

Tantangan rezim harga energi dunia khususnya hasil nonmigas dari komoditas mineral dan batubara yang fluktuatif dan terutama dipengaruhi oleh naik turunnya perekonomian Tiongkok, sekaligus penguasaan pangsa pasar produk dan jasa dunia oleh perusahaan-perusahaan raksasa dengan kapasitas sangat besar terutama dari China yang mengakibatkan *oversupply* produksi dunia, di mana China mendominasi lebih dari 50% produksi dunia.

Maka sudah mendesak, Indonesia memiliki paradigma pertumbuhan ekonomi yang mengandalkan penggunaan energi selain fosil yang ramah lingkungan dan memanfaatkan pengurangan emisi karbon, guna mendorong peningkatan daya beli konsumsi rumah tangga dari sisi pengeluaran dan mendorong peningkatan investasi industri dan jasa yang menghasilkan industri dan jasa orientasi ekspor dan substitusi impor migas dan non migas untuk peningkatan sisi penerimaan.

Akhirnya, transformasi struktur ekonomi Indonesia yang ditujukan untuk pertumbuhan ekonomi tinggi, pemerataan pembangunan dan pendapatan, pengurangan pengangguran dan kemiskinan sangat bertumpu pada kebijakan fiskal yang akomodatif.

Profil Singkat

Dina Nurul Fitria adalah staf pengajar Universitas Pertamina pada Program Studi Ekonomi, yang menyelesaikan pendidikan dari tingkat sarjana, magister dan doktoral di bidang ekonomi industri, studi pembangunan, ekonomi pertanian dan kebijakan publik. Aktif menjadi penulis dan pembicara pada forum ilmiah dan diskusi publik yang bertemakan pembangunan ekonomi dan industri. Pengetahuan dan pengalaman di bidang politik dan tata negara diperolehnya saat menjadi Staf Ahli Pimpinan Komite II, IV dan BKSP DPD RI (20012-2016) dan Tenaga Ahli Pimpinan Lembaga Pengkajian MPR RI.